

Studi Tentang Faktor-Faktor Penentu Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Di Kota Bitung

Alexander Imanuel Wattimena^{#1}

[#] Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT Kelurahan Bahu, Manado, Indonesia, 95115

¹alexanderwattimena@gmail.com

Abstrak

Kota Bitung sebagai salah satu pintu gerbang di Sulawesi Utara yang secara Nasional, maupun Internasional mempunyai kedudukan dan peranan penting sebagai kota pelabuhan perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya untuk membangun kota dan mengupayakan agar potensi alamnya dapat mendatangkan devisa bagi kesejahteraan penduduknya. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat melalui wadah atau instansi teknis pelaksana pembangunan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Bitung. Instansi ini diharapkan agar memperhatikan, membina, bahkan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi kebaikan dan kemajuan kota. Musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) yang selama ini dijalankan secara rutin untuk pengusulan program pembangunan dirasakan perlu untuk diberdayakan secara tulus dan sungguh-sungguh sehingga apa yang dirasakan perlu diprogramkan itulah yang menjadi prioritas utama untuk dikerjakan dalam proyek pembangunan, sehingga masyarakat tidak apriori bahkan mau memberikan dirinya untuk berpartisipasi, karena merasa dihargai dan didengar akan usulan-usulannya. Suatu model yang ideal dan dapat dijadikan acuan dari peran serta adalah pembangunan gedung ibadah, seperti gereja, dimana secara mandiri jemaat merasa terpanggil dan mau memberikan dirinya sejak dari perencanaan, usaha dana, sampai pada pelaksanaan bahkan Kontrol atau evaluasi yang pada gilirannya wadah tersebut digunakan bersama untuk kepentingan bersama, dan akhirnya rasa kecintaan memiliki akan wadah tersebut sangat tinggi. Untuk itu dibutuhkan suatu kajian melalui penelitian tentang faktor-faktor penentu peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pekerjaan umum, dengan metode survey dan teknik pengumpulan data yang menggunakan kuisisioner, serta wawancara dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam musbang maupun yang tidak masing-masing berjumlah 150 orang pada 15 Kelurahan yang ada di Kota Bitung. Adapun hasil analisis data dengan metode pengujian Chi-Square ternyata memberikan gambaran bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi tentang peran serta masyarakat adalah Informasi yang diterima masyarakat dengan hasil uji 17,328 dan Status kepemilikan lahan dengan hasil uji 53,125 yang mana kedua faktor ini adalah unggulan yang harus diperhatikan, sedangkan faktor pendidikan hasil ujinya hanya 6,838 dan domisili hasil ujinya hanya 10,413 serta pendapatan hasil ujinya hanya 4,918 melihat dari hasil uji ini maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut Bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan di Kota Bitung adalah Status Kepemilikan lahan, Informasi yang diterima masyarakat, pendidikan dan domisili. Sedangkan peran serta masyarakat di kota Bitung yang selama ini ada dan terjadi hanya sebatas pada memberikan usulan program yang telah ditentukan oleh pemerintah terlebih dahulu' sedangkan peran serta dalam bentuk tenaga dan pengawasan sangat kecil dan terbatas pada masyarakat berprofesi dan keahlian yang sesuai. Pada dasarnya masyarakat Kota Bitung adalah masyarakat yang ingin mandiri, dan memiliki keinginan-keinginan sendiri dalam mengatur pembangunan pad lingkungannya, ternyata hal ini sejalan dengan Misi Kota Bitung itu sendiri yaitu menciptakan masyarakat yang berkualitas, berkemampuan tinggi, mandiri dan mampu bersaing dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, untuk itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan ketulusan dan kesungguhan dari pihak pemerintah dan sebaiknya tidak hanya menjadi penyedia tetapi lebih dari itu yakni sebagai pemberdaya.

Kata kunci – masyarakat, pembangunan, Pekerjaan Umum, Kota Bitung

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bitung merupakan salah satu pintu gerbang di Sulawesi Utara untuk berhubungan dengan daerah lain bahkan dengan negara lain, hal ini disebabkan karena Kota Bitung sebagai kota pelabuhan sehingga dibutuhkan adanya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka membangun Kota Bitung selain memiliki potensi yang dapat diandalkan, keterlibatan masyarakat berupa peran serta secara aktif sangat dibutuhkan agar pembangunan infra struktur berupa sarana dan prasarana khususnya di bidang Pekerjaan Umum dapat berjalan dan berhasil dengan baik serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rencana dan program pembangunan secara keseluruhan termasuk juga di bidang pekerjaan umum yang akan dilaksanakan di Desa atau Kelurahan pada dasarnya melalui suatu mekanisme yang berjenjang yakni Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes), di tingkat Desa atau Kelurahan selanjutnya dibahas pada Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) II di tingkat Kota /Kabupaten, bahkan pada era orde baru dilanjutkan pada Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) I di Tingkat Propinsi, dan selanjutnya pada Konsultasi Regional (Konrek) dan Konsultasi Tingkat Nasional (Konas) yang biasanya diselenggarakan di Tingkat Pusat. Semuanya ini adalah urutan-urutan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara rutin setiap tahun, yang selanjutnya diturunkan dari pusat dalam bentuk program/proyek yang dianggap merupakan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di setiap Desa atau Kelurahan baik sarana maupun prasarana yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan diberbagai bidang sejak dahulu telah diharapkan. Walaupun istilah berbeda-beda mulai dari gotong royong, mapalus, sampai dengan partisipasi, tetapi pada prinsipnya istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Kenyataan pada setiap Rencana Pembangunan Lima Tahun, peran serta masyarakat mask dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) karena penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini oleh pemerintah dimaksudkan agar peran serta semakin tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bahkan dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan sejauh mana pembangunan masyarakat sudah berhasil atau belum.

Pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum yang berkaitan dengan peran seta masyarakat di Kota Bitung menghadapi berbagai hambatan karena tidak seperti apa yang diharapkan, seperti peran serta dalam memelihara dan membersihkan saluran (drainase), memperbaiki jalan yang rusak akibat genangan air hujan di depan rumah, masyarakat enggan memperbaikinya, semua berharap pada instansi pemerintah pengelolanya seperti Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Kebersihan.

Berbagai program dalam pembangunan yang bersifat partisipatif aktif dari masyarakat telah dibuat, dan dilaksanakan dengan bantuan dana dari luar negeri maksudnya agar dapat merangsang terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan bahkan control/evaluasi agar dapat dijalankan dengan baik misalnya dengan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa tertinggal (P3DT), Program KIP-Tribina ataupun program-program padat karya lainnya ternyata hal in tidaklah menjamin bahwa peran serta masyarakat langsung secara otomatis dapat dirasakan, akan tetapi kenyataannya menjadi lain setelah proyek tersebut selesai. Masyarakat terlibat hanya sebatas pada pelaksanaan proyek itupun kalau mau dilibatkan, dan biasanya terbatas pada kalangan tertentu misalkan perangkat desa atau kelurahan, LKMD, atau masyarakat yang memiliki profesi tukang.

Di Bitung sesuatu yang ideal dan dapat dijadikan contoh yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam hal ini jemaat ketika mendirikan bangunan ibadahnya, seperti pembangunan gedung gereja, antusias jemaat dan kemandiriannya mengakibatkan rasa memiliki sangat tinggi, oleh kerena sejak dari perencanaan, pencarian dana, pelaksanaan pembangunan sampai pada pengawasan dilakukan secara mandiri oleh jemaat yang bersangkutan.

Pada beberapa tempat menunjukkan pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya peran serta / partisipasi masyarakat. Bahkan pada banyak kasus menunjukkan ada masyarakat tertentu menentang program dan pelaksanaan pembangunan. Setelah ditelusuri keadaan in dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

1. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu
2. Pembangunan dipahami untuk menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak dikutsertakan.

Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa pembangunan: 1) harus menguntungkan rakyat; 2) harus dipahami maksudnya oleh rakyat; 3) harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan 4) dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ginanjart Kartasasmita 1997).

B. Perumusan Masalah

Adapun hal-hal yang dapat menjadi permasalahan pada studi kasus ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan dibidang pekerjaan umum di Kota Bitung;
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan dibidang pekerjaan umum di Kota Bitung.

C. Batasam Masalah

Batasan masalah yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah:

1. Studi kasus untuk lokasi penelitian hanya pada Kota Bitung.
2. Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum di Kota Bitung

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang pekerjaan umum di Kota Bitung;
2. Mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang pekerjaan umum di Kota Bitung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk :

1. Bahan acuan dan rumusan bagi para penentu kebijakan pembangunan di daerah atau Kota Bitung dalam menyusun strategi, kebijakan dan program pembangunan Kota.
2. Mengungkapkan berupa analisis peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan pekerjaan umum, yang terlibat dalam musbang dan yang tidak terlibat dalam musbang.
3. Manfaat praktisnya yaitu sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait erat dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pembangunan di Kota Bitung.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi kegiatan yang diambil pada objek penelitian ini adalah Kota Bitung, dimana lokasi kegiatan pembangunan mudah dicapai dengan transportasi yang lancar dan sangat membutuhkan peran masyarakat. Selain itu terdapat data-data pendukung yang cukup lengkap dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu data yang dianalisis secara langsung berdasarkan informasi yang diterima, ditabulasi dan menilai prosentasenya, serta non parametrik, yaitu data yang ada dianalisis dengan pengujian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan mengedarkan angket atau *questionnaire* yang sesuai dengan kebutuhan analisis yang terkait dengan obyek penelitian ini.

Program-program yang diprioritaskan dalam bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut :

1. *Urban Road* (UR) atau Bantuan Peningkatan Jalan/Kabupaten/Kota (BPJK);
2. Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
3. Revitalisasi Pasar Kecamatan;
4. Penyediaan Prasarana Sarana Air Bersih (P2SAB);

5. Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT);
6. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P);
7. *Kampong Improvement Program - Market Infrastructur Improvement Program (KIP-MIIP)*;
8. *Kampong Improvement Program Comuniti Based Development (KIP CBD Tribina)*;
9. Revitalisasi Sekolah Dasar – Madrasah Iptidayah (SD-MI).

Data-data yang ada dikompilasi dan diolah sesuai kebutuhan, kemudian dimodifikasi, ditabulasi, serta diklasifikasikan dengan tujuan agar lebih mudah melakukan perhitungan dan penganalisaan. Alat analisis yang dipergunakan ialah pengujian non parametrik *Chi-Square* atau Chi Kwadrat k sample yang kegunaannya adalah untuk mengestimasi suatu hipotesis lebih dari dua sample, bila datanya berbentuk nominal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Responden

Responden yang diambil, dibagi atas dua bagian yaitu responden yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Musbangdes maupun yang tidak. Tujuan dari pembagian ini yaitu untuk membagi rata distribusi *questionnaire* agar hasil cacahan tidak berat sebelah. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan utamanya yaitu bagaimanakah peran serta atau keperdulian dari responden terhadap suatu kegiatan pembangunan di Kelurahan, tentunya dengan beragam latar belakangnya. Identitas responden terdiri dari Usia (Umur), Jenis kelamin, Pekerjaan tetap/sampingan.

B. Faktor-faktor Penentu Peran Serta Masyarakat

1. Hubungan antara tingkat Pendidikan dengan peran serta masyarakat.
2. Hubungan antara tingkat pendapatan dengan peran serta masyarakat.
3. Hubungan antara informasi dengan peran serta masyarakat.
4. Hubungan antara domisili dengan peran serta masyarakat.
5. Hubungan antara status kepemilikan lahan dengan peran serta masyarakat.

C. Peran Serta Masyarakat

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan Fisik/Tenaga
3. Pengawasan

D. Pandangan/Pengertian

1. Apakah anda mengetahui setiap pembangunan di lokasi anda ?
2. Apakah anda menyetujui setiap program yang dilaksanakan oleh Pemerintah ?
3. Apakah alokasi waktu yang disediakan dalam Menyusun suatu program pembangunan di kelurahan and aitu sudah sesuai ?

4. Jika keuangan telah tersedia, menurut anda apakah masyarakat mampu bekerja sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga ?
5. Apakah anda setuju jika pemerintah hanya sebagai mitra yang memberikan informasi dan arahan teknis, sedangkan pemegang kekuasaan dalam pembangunan adalah masyarakat kelurahan setempat ?
6. Apakah anda setuju jika OMS langsung berhubungan dengan sumber dana untuk mendapatkan bantuan tanpa melewati pihak ke tiga?
7. Apakah anda setuju dengan mengikuti kegiatan-kegiatan rapat dalam pembahasan rencana pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Kelurahan anda ?
8. Bagaimana pendapat anda dengan instansi pemerintah Dinas PU dan Kimpraswil di Kota Bitung ?
9. Apakah kegiatan pembangunan bidang ke PU an (jalan, jembatan, saluran, MCK, Gedung Sekolah, kantor, sarkes, dermaga, air bersih, dll) selama ini di kelurahan anda sesuai tujuan atau sasaran ?

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor - faktor penentu peran serta masyarakat yang mempunyai hubungan signifikan dengan pembangunan di bidang pekerjaan umum di Kota Bitung adalah informasi yang diterima oleh masyarakat, status kepemilikan lahan, serta tingkat pendidikan dengan domisili atau tempat tinggal masyarakat. Sedangkan faktor - faktor penentu peran serta masyarakat yang tidak mempunyai hubungan signifikan adalah tingkat pendapatan.
2. Peran serta masyarakat pada pembangunan bidang pekerjaan umum di Kota Bitung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau kontrol sudah ada namun secara ideal belum terlaksana seperti yang diharapkan karena umumnya masih sebatas pada pengusulan program dan masyarakatpun masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah yang masih sentralistik dan kebijakan pemerintah seringkali inkonsisten akibat skala prioritas pembangunan yang masih berpedoman pada kriteria kepentingan yang berdampak pada melemahnya keberpihakan kepada masyarakat, yang menurut Arnstein tergolong dalam degrees of tokenism, yaitu peran serta yang dilakukan dengan hanya menerima ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan sudah disiapkan terlebih dahulu, kemudian masyarakat mengusulkan dengan arahan dan tujuan pembangunan yang sudah tersusun terlebih dahulu.

B. Saran

1. Penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum di Kota Bitung hendaknya dilaksanakan dengan mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan yang responsif namun secara komprehensif sekaligus dapat mengakomodasi dalam suatu kesatuan sistem. Secara praktis konsep TRIDAYA yang sudah berkembang sebagai as pelaksanaan pembangunan yang secara prinsip bertujuan untuk pemberdayaan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan agar ditumbuh kembangkan sebagai satu sistem pendekatan pembangunan bidang pekerjaan umum.
2. Perlu mengembangkan sistem insentif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan hendaknya dilakukan oleh masyarakat setempat yang diharapkan dapat mendorong berbagai pelaku pembangunan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab karena dilandasi oleh sense of belonging, atau rasa memiliki yang pada gilirannya rasa kecintaan untuk menjaga dan memelihara prasarana dan sarana yang telah ada menjadi bertumbuh. Upaya yang dapat dikembangkan antara lain melalui kegiatan program stimulan, perintisan, dukungan pembiayaan dan bantuan teknis bagi pelaku pembangunan yang responsif didalam penyelenggaraan pembangunan.
3. Kelembagaan pemerintah yang terkait dalam pembangunan agar dapat melibatkan diri secara sinergi bersama seluruh pelaku pembangunan, dan pembangunan harus diselenggarakan dengan berprinsip pada tata pemerintahan yang baik dan pembangunan partisipatif yang berbasis pada upaya menumbuh kembangkan keswadayaan masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum. Seluruh elemen pokok kelembagaan, seperti sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, serta dukungan prasarana dan sarana kelembagaan harus diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal, melalui program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi dan penyusunan tata laksana yang operasional efektif.
4. Konsep Comuniti based development (BD) dengan people centere dimana manusia sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, yang perlu untuk diberdayakan (Empower) oleh karenanya participatori atau peran serta masyarakat sangat perlu untuk digiatkan dalam bentuk bina usaha, bina lingkungan dan bina manusianya yang gilirannya diharapkan pendapatan (income) meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi yaitu pangan dan papan (basic need) yang berdampak pada keadaan kota tidak kumuh dan masyarakat aman tenteram dan sejahtera.
5. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kota Bitung.

KUTIPAN

- [1] Abrams, C, 1969. *Housing The Modern World*, Faber& Faber, London.
- [2] Achmad, AS. 1990. *Manusia dan Informasi*. Lembaga Universitas hasanudin, Ujung Pandang.
- [3] Arnstein, and Sherry R., 1969, 3 July. A Ladder of Citizen Participation, *journal of the American Institute of planners* 8.
- [4] Bagian Hukum Setda Kota Bitung, 2001 Lembaran Daerah Kota Bitung Penerbit Bagian Hukum Kota Bitung.
- [5] Bambang Panuju, 1999 Pengadaan Perumahan Kota dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah, hal 62, 72-79 Penerbit Alumni, Bandung.
- [6] Bhattacharya, J. 1991. *Economic Growth In Cross Section Countries. Quarterly Journal of Economics*.
- [7] Baskoro, J. 2000. Analisis Sosial Ekonomi terhadap peserta Program Pembangunan Kehutanan Kegiatan Usaha Tan Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS). Studi Kasus DAS Limboto kabupaten Gorontalo. Tess. Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [8] Budiharjo Eko dan Hardjohubojo, 1993 Kota Berwawasan Lingkungan. Penerbit Alumni Bandung.
- [9] Budihario Eko dan Sujarto Djoko, 1999 Kota Berkelanjutan. Penerbit Alumni Bandung.
- [10] Burns, Leland S. and Grbler, Leo, 1977. *The Housing Nation, Analysis and Policy in a Comparative Framework, The Mac Milan Press Ltd.*, London, Great Britain.
- [11] Catanase J,A dan James C Snyder, 1986, Pengantar Perencanaan Kota. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- [12] Cohen, J.M. and N.T. Uphoff. 1997. *Rural Development Participation*. Ithca, New York.
- [13] Davis, K and J.W. Newstran. 1990. (Terjemahan Agus Dharma). *Perilaku Dalam Organisasi*. Erlangga, Jakarta.
- [14] Departemen PU- Perm Perumnas 1996 Lingkungan Perumahan Sederhana Mojosongo - Solo, Jakarta.
- [15] Departemen PU- Dirjen Cipta Karya 1997 Kamus Tata Ruang Edisi I, Jakarta.
- [16] Kartasasmita Ginandjar, 1997, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta.
- [17] GBHN. 1993. *Garis-Garis Bear Haluan Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- [18] Leibo Jefta, 1995 *Sosiologi Pedesaan, mencari suatu strategi pembangunan masyarakat desa berparadigma ganda*, Penerbit Andi Offset Yogyakarta.
- [19] Machmur, M. 1988. Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Ekonomi terhadap peran Serta dalam Pengelolaan Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Malang. Tesis Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- [20] Mubyarto. 1985. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3S. Jakarta.
- [21] Mubyarto, dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa tertinggal*. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan kawasan. Universitas Gajah Mada. Aditya Media, Yogyakarta.
- [22] Olvie Atteng. 2000 Peran serta masyarakat dalam penanggulangan sampah Studi kasus Kecamatan Wenang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [23] Riggs, F.W. 1966, *Administration in Developing Countries; The theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin. Boston.
- [24] Seers, Dudley. 1969, "*The Meaning of Development*" *Penguin Books*, Columbia.
- [25] Suparmoko. 1981. *Ekonometrika Pembangunan*. BPEE. Yogyakarta.
- [26] Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju masyarakat partisipatif*. Kanisius Yogyakarta.
- [27] Sugiyono, 1999. *Statistik Non Parametris untuk penelitian*, Penerbit CV Alfa Beta Bandung.
- [28] Syani, Abdul, 1995 *Pengantar Metode Statistik Non parametric*, Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta
- [29] Takalamingan, D. 2000. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pekerja Pengolah Tepung Kelapa PT. Djaka Sakti Buana di Kotamadya Bitung*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [30] Thoha, M. 1990. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendekatan Perilaku*. Rajawali, Jakarta.
- [31] Turner, Jhon F.C, 1976, 1982. *Housing By People, Tavards Autonomy in Building Environments, Moron Boyars Publisher Ltd, London, Great Britain*.
- [32] Wijaya, 2001, *Statistik Non Parametrik, Aplikasi Program SPSS*, Penerbit CV Alfa Beta Bandung.
- [33] Yusri, N. 1992. *Beberapa Alternatif dan Model Pendekatan Dalam Pembinaan Partisipasi Masalah Dalam Pembangunan Desa*. Bandung